

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### a. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas tentang Pengendalian Intern Piutang Usaha sebelumnya sudah pernah dilakukan. Penelitian terdahulu tersebut dapat dijadikan acuan oleh peneliti. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini disajikan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Judul, Peneliti, Tahun	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	“Analisis Pengendalian Intern Piutang Usaha pada Adira Finance Cabang Manado”, Nabila Habibie, 2013	Pengendalian intern piutang usaha	Deskriptif Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"><li>Secara keseluruhan, pengendalian intern terhadap piutang usaha pada PT. Adira Finance Cabang Manado berjalan efektif, dimana manajemen perusahaan sudah menerapkan konsep dan prinsip-prinsip pengendalian intern, di sisi lain terdapat beberapa prosedur yang belum mencerminkan konsep pengendalian intern.</li><li>Pengendalian intern piutang usaha pada PT. Adira Finance Manado menurut kerangka COSO:<ol style="list-style-type: none"><li>Lingkungan pengendalian terhadap piutang usaha pada PT. Adira Manado sudah berjalan efektif, hal ini ditandai salah satunya dengan penerapan SOP (<i>Standard Operating Procedures</i>) pada divisi <i>collection</i>.</li><li>Penentuan resiko</li></ol></li></ol>

				<p>terhadap piutang usaha pada PT. Adira Finance Manado kurang efektif karena fungsi yang melakukan penagihan piutang tidak diasuransikan oleh perusahaan.</p> <p>3. Aktivitas pengendalian intern terhadap piutang usaha pada PT. Adira Finance Manado tidak efektif. Penyebabnya antara lain pengiriman barang dilakukan tanpa adanya otorisasi berupa tanda tangan pada surat order pengiriman oleh fungsi kredit, faktur penjualan yang merupakan dokumen sumber bertambahnya piutang usaha tidak diotorisasi oleh fungsi penagihan.</p> <p>4. Informasi dan komunikasi mengenai piutang usaha telah diterapkan secara efektif, baik informasi yang disampaikan oleh manajemen kepada bawahannya maupun informasi yang berasal dari karyawan kepada manajemen.</p> <p>5. Pengawasan atau pemantauan terhadap piutang usaha telah berjalan dengan baik dan efektif, baik pengawasan yang dilakukan oleh <i>section head</i> maupun audit terhadap piutang usaha oleh komite audit.</p>
--	--	--	--	---

2.	<p>“Peranan Internal Audit dalam Meningkatkan Pengendalian Intern Piutang (Studi Kasus pada PT. Vaksindo Satwa Nusantara)”, Bambang Pamungkas, 2005.</p>	<p>Internal Audit terhadap Pengendalian Intern Piutang</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Vaksindo Satwa Nusantara merupakan produsen vaksin dan obat hewan yang melaksanakan penjualan secara tunai maupun kredit.</li> <li>2. Prosedur penjualan kredit PT Vaksindo Satwa Nusantara telah berjalan sesuai dengan ketentuan perusahaan.</li> <li>3. Peranan internal audit PT Vaksindo Satwa Nusantara telah berjalan cukup baik dalam pengendalian intern piutang.</li> <li>4. Internal audit yang dilakukan perusahaan dengan membuat prosedur tetap terhadap proses penagihan piutang perusahaan.</li> </ol>
3.	<p>“Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern atas Penjualan dan Penagihan Piutang pada PT. Laris Manis Utama Cabang Manado”, Dolli Paulina Surupati, 2013</p>	<p>Sistem Pengendalian Intern Penjualan dan Penagihan Piutang</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Unsur-unsur pengendalian intern atas penjualan PT. Laris Manis Utama Cabang Manado belum efektif. Belum terdapat fungsi kredit dalam melakukan penjualan kredit. Dalam pemberian kredit kepada <i>customer</i> tidak dilakukan survei untuk mengetahui tempat tinggal dan tempat usaha dari <i>customer</i> serta tidak ada identitas pendukung dari <i>customer</i>. Tidak ada otorisasi atas pemberian kredit dan faktur penjualan tunai dari pejabat yang berwenang.</li> <li>b. Unsur-unsur pengendalian intern atas penagihan piutang PT. Laris Manis Utama Cabang Manado pada umumnya sudah efektif hal ini dapat dilihat</li> </ol>

				dari adanya pemisahan fungsi antara fungsi piutang, fungsi penagihan piutang, fungsi penerimaan hasil penagihan dan fungsi pencatatan piutang. Adanya batas maksimum <i>cash on hand</i> , adanya <i>rolling collector</i> dalam melakukan penagihan.
4.	“Evaluasi Sistem Pengendalian Intern terhadap Piutang pada PT Nusantara Surya Sakti”, Gary Hamel, 2013	Sistem Pengendalian Intern Piutang	Deskriptif Kualitatif	<p>1. Sistem pengendalian intern unsur lingkungan pengendalian pada PT Nusantara Surya kurang efektif diakibatkan kurangnya pemeriksaan yang dilakukan audit internal untuk mengatasi praktek pelaporan keuangan dan membantu struktur keuangan dalam menyelesaikan fungsi pertanggungjawaban, sehingga dapat membuka peluang terjadinya kecurangan. Selain itu tidak adanya filosofi perusahaan yang dapat menuntun perusahaan dan karyawan lebih memahami arah tujuan perusahaan, serta menyebabkan adanya parameter bagi karyawan dan perusahaan.</p> <p>2. Penilaian resiko pada PT Nusantara Surya Sakti Amurang telah berjalan dengan efektif, yaitu dengan adanya prosedur dan kebijakan kredit untuk mengendalikan resiko kredit. Perusahaan juga mengasuransikan fungsi yang melakukan penagihan.</p> <p>3. Informasi dan Komunikasi PT Nusantara Surya Sakti</p>

				<p>mengenai piutang usaha telah diterapkan dengan cukup efektif, baik informasi yang disampaikan oleh manajemen kepada bawahannya maupun informasi yang berasal dari karyawan kepada manajemen.</p> <p>4. Aktivitas pengendalian intern kurang efektif karena admin piutang menerima pembayaran dari debitur, ini diakibatkan tidak ada pemisahan tugas bagian pembukuan dan bagian penerimaan kas.</p> <p>5. Aktivitas pemantauan telah dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan yaitu setiap bagian melaporkan kinerja masing-masing kepada pusat. Namun kurangnya pemantauan dari audit internal yang hanya melakukan pemeriksaan satu kali dalam setahun, hal ini memungkinkan terjadinya kecurangan.</p> <p>6. PT Nusantara Surya Sakti telah menetapkan prosedur penjualan kredit dan kebijakannya dengan memenuhi persyaratan pengendalian intern yang efektif. Adanya <i>list</i> atau daftar penilaian untuk menilai kelayakan dari konsumen yang dipegang oleh setiap surveyor, hal ini menunjukkan bahwa PT Nusantara Surya Sakti tidak sembarangan dalam melakukan penjualan kredit.</p>
5.	<i>“The Effect of a Credit Sales</i>	<i>Credit Sales</i>	<i>Qualitative Descriptive</i>	1. <i>There is a significant effect of the Credit Sales</i>

	<p><i>Accounting Information System on the Effectiveness of Account Control in PT Megah Kayu Industri Bandung</i>”, Karissa Rizka and Remon Gunanta, 2021</p> <p>“Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit terhadap Efektivitas Pengendalian Akun di PT Megah Kayu Industri Bandung”, Karissa Rizka dan Remon Gunanta, 2021</p>	<p><i>Accounting Information System on the Effectiveness of Accounts Control</i></p> <p>Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit tentang Efektivitas Pengendalian Akun</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p><i>Accounting Information System on the Effectiveness of Accounts Receivable Control.</i></p> <p>2. <i>There is a significant effect of the Cash Receipts Accounting Information System on the Effectiveness of Accounts Receivable Control.</i></p> <p>3. <i>There is a significant effect of the Credit Sales Accounting Information System and the Cash Receipts Accounting Information System on the Effectiveness of Accounts Receivables Control.</i></p> <p>1. Terdapat pengaruh yang signifikan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit terhadap Efektivitas Pengendalian Piutang Usaha.</p> <p>2. Terdapat pengaruh yang signifikan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas terhadap Efektivitas Pengendalian Piutang Usaha.</p> <p>3. Terdapat pengaruh yang signifikan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit dan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas terhadap Efektivitas Pengendalian Piutang Usaha.</p>
--	---	---	------------------------------	---

Sumber: Data penelitian diolah, 2021

Persamaan antara penelitian terdahulu di atas dengan rencana penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus penelitiannya yaitu pengendalian intern piutang usaha. Sedangkan perbedaan antara penelitian

terdahulu di atas dengan rencana penelitian yang akan dilakukan yaitu peneliti menggunakan obyek penelitian di PT. Farza Indo Cahaya Abadi.

**b. Tinjauan Teori**

**a. Piutang Usaha**

Menurut Farah Margaretha (2011: 57) yang dimaksud dengan piutang yaitu aktiva atau kekayaan yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya penjualan secara kredit. Piutang timbul dari beberapa jenis transaksi, dimana yang paling umum adalah dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang biasanya timbul sebagai akibat dari transaksi-transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa, pemberian pinjaman, pesanan-pesanan yang diterima atau saham dan surat berharga lain yang akan diterbitkan, klaim atas ganti rugi dari perusahaan asuransi, dan sewa atas aktiva yang dioperasikan oleh pihak lain.

Klasifikasi piutang yaitu piutang usaha, wesel tagih, dan piutang lain-lain. Piutang usaha diperkirakan dapat tertagih 30-60 hari. Wesel tagih periode kreditnya lebih dari 60 hari. Piutang lain-lain jika dapat tertagih dalam satu tahun, maka diklasifikasikan sebagai aktiva lancar dan jika tertagih lebih dari satu tahun maka diklasifikasikan sebagai aktiva tidak lancar.

1. Piutang Dagang (*Trade Receivable*) adalah jumlah yang terutang oleh pelanggan untuk barang dan jasa yang telah diberikan sebagai bagian dari operasi bisnis normal. Piutang dagang biasanya yang

paling signifikan yang dimiliki perusahaan. Piutang dagang dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Piutang Usaha (*Account Receivable*) merupakan jumlah yang dibayarkan oleh pelanggan atas penjualan barang dan jasa dalam kegiatan usaha normal. Waktu pembayaran piutang usaha pada umumnya antara 30-60 hari. Pemberian kredit ini dilakukan dengan perjanjian informal antara penjual dan pembeli yang didukung oleh dokumen-dokumen perusahaan, seperti faktur pesanan penjualan dan kontrak penyerahan. Biasanya piutang dagang dikenakan biaya, walaupun ada kemungkinan bunga ataupun beban ditambahkan jika pembayaran tidak dilakukan dalam satu periode yang telah ditentukan yaitu periode dimana debitur wajib melunasi hutangnya.
2. Wesel Tagih (*Notes Receivable*) adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Wesel tagih dapat berasal dari penjualan, pembiayaan ataupun transaksi lainnya. Tetapi wesel tagih kebanyakan berasal dari transaksi peminjaman uang yaitu dengan diberikannya *trade receivable* dengan disertai wesel. Wesel tagih bisa bersifat jangka panjang.
2. Piutang Non Dagang (*Non Trade Receivable*) adalah semua piutang yang timbul dari transaksi-transaksi yang secara tidak langsung

berhubungan dengan penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh perusahaan, termasuk diantaranya sebagai berikut:

- a. Piutang yang timbul dari transaksi pinjaman, seperti piutang kepada perusahaan afiliasi, piutang karyawan.
  - b. Piutang kepada perusahaan asuransi, atas kerugian-kerugian yang dipertanggungjawabkan.
  - c. Piutang pajak yang disetor.
  - d. Piutang yang timbul dari pesanan atas penjualan atau penerbitan surat-surat berharga atau sekuritas seperti piutang saham, piutang pemesan surat utang obligasi.
3. Piutang yang timbul dan merupakan fungsi waktu dan piutang pendapatan seperti piutang bunga, sewa, deviden, royaltis.

Baridwan (2004: 127) menyatakan metode penghapusan piutang adalah piutang usaha yang tidak mungkin dapat ditagih, seperti debiturnya bangkrut, meninggal, pailit dan lain-lain harus dihapuskan sehingga akan menjadi biaya bagi perusahaan. Untuk mencatat penghapusan piutang usaha tersebut dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Metode Penghapusan Langsung (*Direct Method*)

Metode ini biasanya digunakan pada perusahaan-perusahaan yang berskala kecil atau dapat juga diterapkan pada perusahaan yang tidak dapat menaksirkan kerugian piutang usaha dengan tepat. Pada akhir periode akuntansi tidak dilakukan perhitungan taksiran

kerugian piutang, tetapi kerugian piutang baru dicatat apabila telah pasti tidak dapat ditagih. Sehingga piutang tersebut akan dihapuskan dan dibebankan pada perkiraan kerugian piutang dan mengkreditkan piutang usaha.

## 2. Metode Cadangan (*Allowance Method*)

Metode ini digunakan oleh perusahaan berskala besar, dimana perusahaan sudah membuat estimasi atau perkiraan mengenai kerugian piutang yang akan diterima akibat tidak dapat ditagih seluruhnya.

Menurut Surupati (2013) prosedur penagihan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Bagian piutang memberikan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih kepada bagian penagihan.
2. Bagian penagihan mengirimkan penagihan, yang merupakan karyawan perusahaan untuk melakukan penagihan kepada debitur.
3. Bagian penagihan mengirimkan giro atas nama dan surat pemberitahuan dari debitur.
4. Bagian penagihan menyerahkan giro kepada bagian kas.
5. Bagian penagihan menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang.
6. Bagian kas mengirim kuitansi sebagai tanda penerimaan kas kepada debitur.
7. Bagian kas menyetorkan giro atas nama.

## **b. Pengendalian Intern**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007: 319) pengendalian internal adalah sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Laporan COSO yang dikutip oleh Haryono (2001: 252) mendefinisikan pengendalian intern sebagai salah satu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel satuan usaha lainnya yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal berikut:

1. Keandalan pelaporan keuangan.
2. Kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
3. Efektivitas dan efisiensi operasi

Konsep-konsep dasar yang terkandung dalam definisi di atas adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian intern adalah suatu proses. Berarti bahwa pengendalian intern merupakan cara untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Pengendalian intern terdiri dari serangkaian tindakan yang melekat dan terintegrasi dalam infrastruktur satuan usaha.

2. Pengendalian intern dipengaruhi oleh manusia. Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari serangkaian buku pedoman kebijakan dan formulir-formulir, tetapi juga orang-orang pada berbagai jenjang dalam suatu organisasi, termasuk dewan komisaris, manajemen, serta personel lainnya.
3. Pengendalian intern hanya diharapkan memberikan keyakinan memadai, bukannya keyakinan penuh bagi manajemen dan dewan komisaris satuan usaha karena adanya kelemahan-kelemahan bawaan yang melekat pada seluruh sistem pengendalian intern dan perlunya mempertimbangkan biaya dan manfaat yang bersangkutan dengan penetapan pengendalian tersebut.
4. Pengendalian intern adalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan dalam berbagai hal yang satu sama lain tumpang tindih yaitu pelaporan keuangan, kesesuaian dan operasi.

Pengendalian intern juga mempunyai pengertian dalam arti sempit maupun luas. Sistem pengendalian intern dalam arti sempit sama dengan istilah *internal check*, yaitu prosedur-prosedur mekanis untuk memeriksa ketelitian data-data administrasi seperti misalnya mencocokkan penjumlahan horizontal dengan penjumlahan vertikal. Sedangkan dalam arti luas, sistem pengendalian intern dipandang sebagai sistem sosial yang mempunyai makna/wawasan khusus yang berbeda dalam organisasi perusahaan. Sistem pengendalian akuntansi

dan sistem pengendalian administratif termasuk dalam sistem pengendalian dalam arti luas.

Sedangkan sistem Pengendalian Intern menurut AICPA atau *American Institute Of Certified Public Accountants* dalam Singal & Tirayoh (2015) meliputi struktur organisasi, semua metode-metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan. Definisi tersebut menekankan pada yang hendak dicapai, bukan pada elemen-elemen yang membentuk sistem tersebut. Tujuan sistem pengendalian intern menurut definisi tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Menjaga kekayaan organisasi

Harta fisik perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan. Sistem pengendalian intern dibentuk guna mencegah ataupun menemukan harta yang hilang.

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi

Manajemen harus memiliki data akuntansi yang dapat diuji ketepatannya untuk melaksanakan operasi perusahaan, berbagai macam data yang digunakan untuk mengambil keputusan yang penting.

### 3. Mendorong efisiensi usaha

Pengendalian dalam suatu perusahaan juga dimaksudkan untuk menghindari pekerjaan-pekerjaan berganda yang tidak perlu, mencegah pemborosan terhadap semua aspek usaha termasuk pencegahan terhadap penggunaan sumber-sumber dana yang efisien.

### 4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Manajemen menyusun prosedur dan peraturan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sistem pengendalian intern memberikan jaminan akan ditaatinya prosedur dan peraturan tersebut oleh perusahaan.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah sistem, struktur, atau prosedur yang saling berhubungan memiliki beberapa tujuan pokok yaitu menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi yang dikoordinasikan sedemikian rupa, dan mendorong dipatuhinya kebijakan hukum dan peraturan yang berlaku untuk melaksanakan fungsi utama perusahaan.

Mulyadi (2001: 164) menyatakan unsur-unsur pokok sistem pengendalian intern meliputi lima unsur besar yang tiap poinnya tidak dapat dipisahkan yaitu sebagai berikut:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Prinsip pembagiannya adalah harus dipisahkan fungsi-

fungsi operasi, penyimpanan, dan fungsi akuntansi. Kemudian suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, pendapatan, dan biaya.
3. Sistem otorisasi akan menjamin dokumen pembukuan yang dapat dipercaya dan prosedur pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi yang diteliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya.
4. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi, yaitu dengan penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang; setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau unit organisasi lain; pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu pada pihak yang akan diperiksa dengan jadwal yang tidak teratur; perputaran jabatan yang diadakan secara rutin akan menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga persekongkolan diantara mereka dapat terhindar.
5. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya merekrut karyawan yang dapat digaji dengan rendah. Ini menimbulkan adanya cara kerja yang salah atau tidak sesuai

dengan kemampuannya. Untuk memperoleh karyawan yang baik dapat ditempuh dengan seleksi karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya, kemudian harus adanya pengembangan pendidikan karyawan selain menjadi karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya.

Laporan COSO yang dikutip oleh Haryono (2001: 253) menyatakan bahwa terdapat lima komponen struktur pengendalian intern yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsur pengendalian intern, yang membentuk disiplin dan struktur serta mencerminkan sikap dan tindakan para pemilik dan manajer entitas mengenai pentingnya pengendalian intern entitas. Efektifitas informasi dan komunikasi serta aktifitas pengendalian sangat ditentukan oleh atmosfer yang diciptakan oleh lingkungan pengendalian, seperti terciptanya lingkungan yang nyaman untuk bekerja di dalam lingkungan kantor. Kenyamanan seperti ini yang akan menciptakan suatu lingkungan pengendalian yang efektif dan efisien, karena lingkungan yang efektif dan efisien dapat meningkatkan produktifitas kerja karyawan.

Lingkungan pengendalian merupakan pondasi dari komponen lainnya dan meliputi beberapa faktor, diantaranya integritas dan etika, komitmen untuk meningkatkan kompetensi, filosofi manajemen dan jenis operasi, dan kebijakan dan praktik sumber daya manusia.

## 2. Perhitungan Resiko

Perhitungan resiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan resiko suatu perusahaan (entitas) berkenaan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Perhitungan resiko oleh manajemen harus mencakup pertimbangan khusus untuk resiko yang bisa muncul akibat perubahan-perubahan yang terjadi, seperti adanya *user* baru dengan pekerjaan yang tidak pasti, perubahan undang-undang dan peraturan, dan lain-lain.

## 3. Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi yang berhubungan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang mencakup sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan-catatan yang digunakan untuk mengidentifikasi, menggabungkan, menganalisis, menggolongkan, mencatat dan melaporkan transaksi perusahaan (termasuk pula kejadian-kejadian dan kondisi) dan menyelenggarakan pertanggungjawaban atas aktiva dan kewajiban yang bersangkutan. Komunikasi menyangkut pemberian pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung

jawab masing-masing individu berkenaan dengan struktur pengendalian intern atas laporan keuangan.

#### 4. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan prosedur yang dibuat untuk memberi keyakinan bahwa petunjuk yang di buat oleh manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang di perlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi resiko dalam pencapaian entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai macam tujuan dan di terapkan dalam berbagai tingkat dan fungsi organisasi, aktivitas pengendalian juga meliputi penaksiran resiko yang bertujuan untuk pelaporan keuangan perusahaan yang berguna untuk identifikasi, analisis, dan pengelolaan resiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia.

#### 5. Pemonitoran

Pemonitoran adalah adalah suatu proses penilaian kualitas kinerja struktur pengendalian intern sepanjang masa. Hal itu menyangkut penilaian tentang rancangan dan pelaksanaan operasi pengendalian oleh orang-orang yang tetap untuk setiap periode waktu tertentu, untuk menentukan bahwa system pengendalian intern telah berjalan sesuai dengan yang dikehendaki dan bahwa

modifikasi yang diperlukan karena adanya perubahan-perubahan kondisi telah dilakukan.

Menurut Arens & Loebbecke (2009: 258) dalam Tohang (2019), manajemen dalam merancang struktur pengendalian internal mempunyai kepentingan-kepentingan sebagai berikut:

#### 2.2.1. Keandalan Laporan Keuangan

Manajemen perusahaan bertanggung jawab dalam menyiapkan laporan keuangan bagi investor, kreditor dan pengguna lainnya. Manajemen mempunyai kewajiban hukum dan profesional untuk menjamin bahwa informasi telah disiapkan sesuai standar laporan, yaitu prinsip akuntansi yang berlaku umum.

#### 2.2.2. Mendorong efektifitas dan efisiensi operasional

Pengendalian dalam suatu organisasi adalah alat untuk mencegah kegiatan dan pemborosan yang tidak perlu dalam segala aspek usaha, dan untuk mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan efisien.

#### 2.2.3. Ketaatan pada hukum dan peraturan

Pengendalian internal yang baik tidak hanya menyediakan seperangkat peraturan lengkap dan sanksinya saja. Tetapi pengendalian internal yang baik, akan mampu mendorong setiap personal untuk dapat mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan dan berkaitan erat dengan akuntansi contohnya adalah UU Perpajakan dan UU Perseroan Terbatas.

Prosedur pengendalian merupakan kebijakan dan aturan mengenai kelakuan karyawan yang dibuat untuk menjamin bahwa tujuan pengendalian manajemen dapat tercapai. Menurut Tohang (2019) secara umum prosedur pengendalian yang baik terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Penggunaan Wewenang Secara Tepat

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Dengan adanya pembagian wewenang ini akan mempermudah jika akan dilakukan *audit trail*, karena otorisasi membatasi aktivitas transaksi hanya pada orang-orang yang terpilih. Otorisasi mencegah terjadinya penyelewengan transaksi kepada orang lain.

#### 2. Pembagian Tugas

Pembagian tugas memisahkan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi (pencatatan). Dan suatu fungsi tidak boleh melaksanakan semua tahap suatu transaksi. Dengan pemisahan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi pencatatan, catatan akuntansi yang disiapkan dapat mencerminkan transaksi yang sesungguhnya terjadi pada fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. Jika semua fungsi disatukan, akan membuka

kemungkinan terjadinya pencatatan transaksi yang sebenarnya tidak terjadi, sehingga informasi akuntansi yang dihasilkan tidak dapat dipercaya kebenarannya, dan sebagai akibatnya kekayaan organisasi tidak terjamin keamanannya.

### 3. Dokumen dan Catatan yang Memadai.

Prosedur harus mencakup perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai untuk membantu meyakinkan adanya pencatatan transaksi dan kejadian secara memadai. Selanjutnya dokumen dan catatan yang memadai akan menghasilkan informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan dan biaya suatu organisasi. (biasanya dilakukan berdampingan dengan penggunaan wewenang secara tepat).

### 4. Keamanan yang memadai terhadap aset dan catatan.

Keamanan yang memadai meliputi pembatasan akses ke tempat penyimpanan aset dan catatan perusahaan untuk menghindari terjadinya pencurian aset dan data/informasi perusahaan.

### 5. Pengecekan independen terhadap kinerja

Semua catatan mengenai aktiva yang ada harus dibandingkan (dicek) secara periodik dengan aktiva yang ada secara fisik. Pengecekan ini harus dilakukan oleh suatu unit organisasi yang independen (selain unit fungsi penyimpanan, unit

fungsi operasi dan unit fungsi pencatatan) untuk menjaga objektivitas pemeriksaan.

**c. Pengendalian Intern Piutang Usaha**

Pengendalian intern terhadap piutang usaha sebagai tindakan preventif atas keselamatan piutang usaha dari adanya kemungkinan piutang tak tertagih, keterlambatan penagihan dan penyalahgunaan piutang oleh karyawan. Ditinjau dari cara pendekatan manajemen preventif, maka ada tiga bidang pengendalian yang umum pada titik mana dapat diambil tindakan untuk mewujudkan pengendalian piutang. Ketiga bidang itu adalah pemberian kredit dagang, penagihan, dan penetapan dan penyelenggaraan pengendalian intern yang layak (Widiasmara, 2014).

Menurut Surupati (2013) prinsip-prinsip pengendalian piutang yang baik yaitu sebagai berikut:

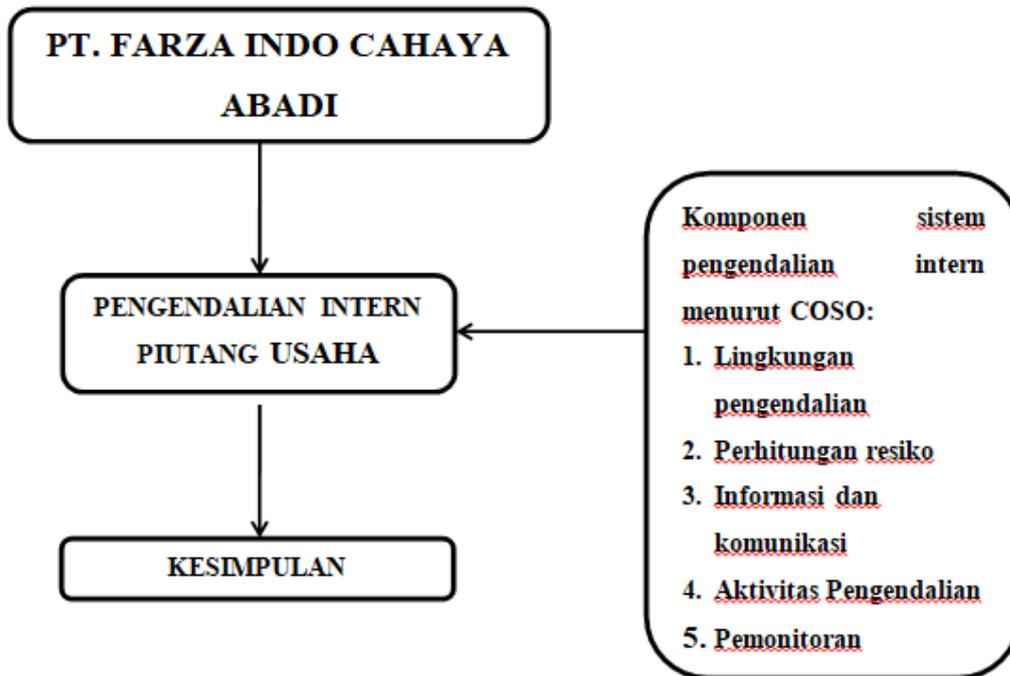
1. Pemisahan fungsi dan tugas.
2. Semua transaksi pemberian kredit, pemberian potongan, dan penghapusan piutang harus mendapat persetujuan yang berwenang.
3. Menggunakan buku tambahan piutang (*account receivable subsidiary ledger*) yang berfungsi sebagai rincian buku piutang.
4. Mengirim surat pernyataan piutang pada debitur paling tidak sebulan sekali.
5. Membuat daftar umur piutang.

Mendeteksi kemungkinan kredit bermasalah dapat dimulai saat kreditur melakukan analisa terhadap calon debitur ketika mengajukan permohonan fasilitas kredit. Deteksi awal kredit bermasalah adalah hal yang sangat penting, karena kredit bermasalah merupakan sumber utama meningkatnya piutang tak tertagih. Makin tinggi rasio piutang tak tertagih dan jumlah unit tarik barang akan menjadi masa kritis bagi kelangsungan usaha perusahaan.

Pemberian piutang dimaksudkan untuk meningkatkan volume penjualan bagi sebuah perusahaan. Diharapkan dengan meningkatnya volume penjualan, maka sebuah perusahaan dapat memperoleh keuntungan. Namun ada beberapa resiko atas keberadaan piutang itu sendiri yang dapat merugikan perusahaan. Oleh karena itu perlu adanya pengendalian standar yang telah ditetapkan, maka perusahaan perlu melakukan perbaikan. Menurut Mulyadi (2001: 163) tujuan sistem pengendalian intern adalah menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

**c. Kerangka Konseptual**

Pengendalian Intern Piutang Usaha pada PT. Farza Indo Cahaya Abadi disajikan dalam kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual